

RILIS HASIL PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA
TRIWULAN II

PENCEGAHAN

1. Imbauan Tertulis

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Mengeluarkan surat imbauan nomor 9/PM.00.02/K.SB-02/06/2025 Tanggal 16 Juni 2025 kepada KPU Kabupaten Dharmasraya agar cermat dan sesuai aturan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan

2. Koordinasi dengan Stakeholder

Melaksanakan rapat koordinasi rutin dengan KPU Kabupaten Dharmasraya, Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya, serta pemerintah daerah terkait sinkronisasi data kependudukan.

Menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal untuk memperkuat pengawasan partisipatif.

3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Memberikan edukasi tentang pentingnya daftar pemilih yang akurat melalui media sosial DAN Mengajak masyarakat untuk aktif memeriksa dan memastikan namanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih.

4. Pembentukan Posko Pengaduan

Membuka posko pengaduan masyarakat di kantor Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk menampung laporan terkait daftar pemilih bermasalah.

5. Saran Perbaikan

No	Tanggal	Nomor Surat	Keterangan
1	1 Juli 2025	16/PM.00.02/K.SB-02/07/2025.	a) Data pemilih yang meninggal dunia 45 Data b) Data pemilih Purn. TNI 1 Data KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan sudah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu

			<p>Kabupaten Dharmasraya, sebelumnya bawaslu Kabupaten Dharmasraya menyampaikan 46 data, dari 46 data tersebut KPU memberikan keterangan <i>(tindak lanjut juga disampaikan KPU kabupaten Dharmasraya melalui surat KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 36/PL/02-SD/1310/3/2025 Tanggal 2 Juli 2025) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Data meninggal Dunia sudah di TMS kan Sebanyak 3 orang ➤ 1 Data Purn. TNI sudah ditambahkan sebagai pemilih baru dalam data pemilih ➤ 8 data tidak bisa dilakukan pengecekan karna data Invalid <p>34 data belum bisa dihapus karna data masih ada terdaftar di SIAK capil, karna belum ada surat keterangan kematian</p>
2	18 September 2025	34/PM.02.02 /K.SB-02/09/2025.	<p>a) pemilih meninggal dunia : 102</p> <p>b) Alih status menjadi POLRI : 9</p> <p>c) Alih status menjadi TNI : 2</p> <p>d) Anggota POLRI yang beralih status menjadi masyarakat Sipil : 3</p> <p>e) Pindah domisili (masuk) : 144</p> <p>f) Pemilih pindah domisili (Keluar) : 5</p> <p>Pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun belum masuk dalam DPB : 363</p>

6. Pojok Pengawasan

7. Koordinasi

Kegiatan koordinasi yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya adalah :

- Koordinasi bersama KPU Kabupaten Dharmasraya
- Koordinasi bersama Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya

- Koordinasi bersama Stakeholder
- Koordinasi Bersama Wali Nagari di Kabupaten Dharmasraya

8. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, tanggal 02 Juli 2025 di Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya.

Kegiatan dimulai pada pukul 10.45 WIB, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya, Dandim 0310/SSD, Polres Dharmasraya dan KPU Kabupaten Dharmasraya, yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya.

Penyampaian hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya (Wilri Iswandi), dengan rincian :

- 1) Pemilih DPT Pemilihan sebelumnya berjumlah 168.913
- 2) Pemilih Baru 1.608
- 3) Pemilih TMS 486
- 4) Jumlah PDPb triwulan II 170.035

COKTAS (PENCOKLITAS TERBATAS)

KPU Kabupaten Dharmasraya belum melaksanakan cektas dan akan dilakukan pada triwulan IV.

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH (DIM) PENGAWASAN PDPB :

- a) Pemilih meninggal dunia belum sepenuhnya dicoret karena belum ada surat keterangan kematian dari keluarga.
- b) Data pemilih pindah domisili belum seluruhnya ter-update.
- c) Akses KPU ke sistem SIAK Dukcapil terbatas, hanya manual, sehingga memperlambat proses sinkronisasi.
- d) Terdapat perbedaan status kependudukan antara data KPU dan Dukcapil (contoh: warga yang sudah meninggal di data KPU, tetapi masih hidup di data Dukcapil).
- e) Tidak semua nagari melaporkan data kematian warganya secara rutin

- f) Rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan perubahan status kependudukan (kematian, pindah, dll.)
- g) Ada keluarga yang enggan mengurus akta kematian karena merasa tidak ada manfaat langsung.
- h) Terbatasnya jumlah SDM pengawas untuk menjangkau seluruh nagari.
- i) Anggaran pengawasan faktual ke lapangan masih minim.
- j) Keterbatasan sarana prasarana (akses teknologi, transportasi, dan dukungan administratif).